



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

2024

Laporan Akuntabilitas

**BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**
Kota Balikpapan





IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi Indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan dengan pagu anggaran sebesar Rp122.325.166.463,37 realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp109.482.020.495,69 atau mencapai 89,50%. Berdasarkan hasil evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 adalah 71,16 atau predikat BB (SANGAT BAIK) dan merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat dan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat disusun dengan baik. LKjIP Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya LKjIP ini agar kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan pada Tahun 2024 dapat tergambar dengan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan juga memberikan pelayanan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Demikian LKjIP ini kami susun diharapkan kepada semua pihak dapat menilai, mengoreksi/mengevaluasi dan memberi masukan atas laporan kinerja organisasi selama satu tahun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju tertib administrasi Pemerintah Kota.

Balikpapan, 24 Februari 2025

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Balikpapan

AGUS BUDI PRASETYO, S.I.P., MT
Pembina Utama Muda



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.4.1 Dasar Pembentukan Organisasi	3
1.4.2 Tugas dan Fungsi	3
1.4.3 Struktur Organisasi	18
1.4.4 Sumber Daya Perangkat Daerah BKAD Kota Balikpapan	19
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	27
1.6 Sistematika Penulisan	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
2.1 Rencana Strategis.....	31
2.1.1 Tujuan	31
2.1.2 Sasaran	31
2.2 Indikator Kinerja Utama	43
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	50
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.....	50
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	51



3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	52
3.2.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2024	54
3.2.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra.....	55
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	56
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	57
3.2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	70
3.2.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja	72
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	73
BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran dan Rekomendasi.....	77



DAFTAR TABEL

Table 1.4.1 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan	19
Table 1.4.2 Jumlah Pegawai Non PNS	20
Table 1.4.3 Sarana dan Prasarana Kantor BKAD	21
Table 1.5.1 Isu Strategis BKAD.....	28
Table 2.1.1 Misi,Tujuan, Sasaran, dan Urusan BKAD Kota Balikpapan Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Periode 2021- 2026	31
Table 2.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	32
Table 3.1.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023	50
Table 3.1.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut LHE 2023	51
Table 3.2.1 Predikat Capaian Kinerja.....	52
Table 3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	52
Table 3.2.3 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2024.....	54
Table 3.2.4 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra.....	55
Table 3.2.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Rata-rata Capaian Nasional	56
Table 3.2.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP BKAD 2023 yang dievaluasi Tahun 2024.....	58
Table 3.2.7 Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 Kota Seluruh Indonesia Kategori Kemampuan Keuangan Tinggi .	59
Table 3.2.8 Hasil Pengukuran Dimensi 1 - Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	63
Table 3.2.9 Hasil Pengukuran Dimensi 2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	63
Table 3.2.10 Hasil Pengukuran Dimensi 3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	64
Table 3.2.11 Hasil Pengukuran Dimensi 4 - Penyerapan Anggaran.....	66
Table 3.2.12 Hasil Pengukuran Dimensi 5 - Kondisi Keunagan Daerah	68
Table 3.2.13 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	71
Table 3.2.14 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja	72
Table 3.3.1 Realisasi Anggaran BKAD 2023	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan adalah suatu gambaran akuntabilitas kinerja pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan setiap Tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian Visi dan Misi tersebut, sekaligus dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perencanaan ke depan.

LKjIP yang disusun dan dilaporkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Balikpapan Kota Balikpapan tahun 2024 merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan yang harus dipertanggung jawabkan pada akhir tahun 2024, yang merupakan tahun kelima atau tahun akhir pelaksanaan RENSTRA Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan janji yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan tahun 2024, sekaligus dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun tahun 2021-2026 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKJIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan tahun 2024 adalah:

1. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan tentang kinerja Instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Sebagai parameter penilaian Kinerja Perangkat Daerah.
3. Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di bidang administrasi .
5. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya
6. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

1.4.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 dalam rangka Penyusunan Uraian Tugas Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Keuangan, maka BKAD Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.

1.4.2 Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 BKAD mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelola keuangan dan Barang Milik Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah;
5. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua Perangkat Daerah dan masyarakat dalam lingkup urusan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah;
6. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelola keuangan dan Barang Milik Daerah;
7. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLUD;
8. Pengoordinasian dan rekonsiliasi pendapatan Daerah;
9. Pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah;
10. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kepala BKAD Kota Balikpapan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dengan uraian sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protocol, hubungan masyarakat, layanan informasi dan pengaduan, pembinaan pelayanan public, kearsipan, surat menyurat dan evaluasi dan pelaporan. Sekretaris selain melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, layanan informasi dan pengaduan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Badan;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;

- l. pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- m. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi;
- n. pengoordinasian pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
- o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Program

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
 - 1) rencana strategis;
 - 2) rencana kerja;
 - 3) rencana kerja tahunan;
 - 4) penetapan kinerja; dan
 - 5) laporan kinerja.
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;
- e. mengoordinasikan pembangunan, pengembang pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- h. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- i. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;

- j. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;
- k. memfasilitasi pembinaan tata kelola Pelayanan Publik;
- l. melaksanakan pengelolaan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
- m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- b. mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- d. mengelola penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Kontribusi dari hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- e. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- f. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- g. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- h. menyusun laporan keuangan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- d. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;

- f. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. melaksanakan pengamanan hardware, software dan data elektronik yang digunakan oleh Badan;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis bidang keuangan dan barang milik Daerah dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Anggaran. Kepala Bidang Anggaran selain melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Anggaran;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah;
- c. penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan dan administrasi APBD;
- d. perumusan bahan kebijakan dan pembinaan teknis penyusunan APBD;
- e. penyusunan konsep Nota Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD;
- f. penyusunan dan pengoordinasian analisa standar biaya, standarisasi biaya umum dan jasa dan harga satuan pokok kegiatan;
- g. pelaksanaan penelitian dan analisa bahan serta data pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk penyusunan APBD dan Perubahan APBD;

- h. pelaksanaan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pendapatan

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Pendapatan;
- b. menghimpun dan mengolah bahan serta data pendapatan untuk penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan verifikasi dan klasifikasi pendapatan;
- d. menyiapkan bahan laporan pendapatan secara periodik;
- e. melaksanakan analisis penempatan uang Daerah melalui investasi Daerah dalam rangka penerimaan Daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.8 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Penyusunan Anggaran

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Penyusunan Anggaran;
- b. menyusun bahan konsep kebijakan penyusunan Anggaran;
- c. menyiapkan bahan Nota Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah;
- e. melaksanakan verifikasi/asistensi rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD;
- f. menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja dan pembiayaan;
- g. menyiapkan bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana sebagai pengendali pelaksanaan APBD;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.9 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Kebijakan Administrasi Keuangan

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Kebijakan Administrasi Keuangan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, pengelolaan, dan pembinaan teknis administrasi keuangan Daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan petunjuk teknis penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah;
- d. menyiapkan bahan analisa standar belanja dan standar harga barang dan jasa; menyiapkan bahan Rancangan Peraturan Daerah mengenai investasi Daerah, pembentukan dana cadangan, pinjaman Daerah/hutang, penyertaan modal, obligasi Daerah, dan pinjaman Daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.10 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang perbendaharaan. Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan membawahkan Subbidang dan setiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
- b. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di Bidang Perbendaharaan;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan di Bidang Perbendaharaan;
- d. perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Surat Perintah Membayar dan penerbitan surat perintah pencairan dana;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.4.2.11 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Belanja Tidak Langsung

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Belanja Tidak Langsung;
- b. melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah membayar Belanja Tidak langsung;
- c. melaksanakan penerbitan surat perintah pencairan dana Belanja Tidak langsung;
- d. mengeluarkan surat penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana terhadap surat perintah membayar Belanja Tidak langsung;
- e. menghimpun dan memverifikasi data gaji pegawai Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran;
- g. melaksanakan penyetoran potongan gaji Pegawai Negeri Sipil kepada pihak ketiga;
- h. melakukan Rekonsiliasi gaji;
- i. membuat laporan periodik kepada instansi terkait sesuai
- j. ketentuan;
- k. melaksanakan
- l. monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.12 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Belanja Langsung

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Belanja Langsung;
- b. melaksanakan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah membayar Belanja langsung;
- c. melaksanakan penerbitan surat perintah pencairan dana Belanja langsung;
- d. mengeluarkan surat penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana terhadap surat perintah membayar Belanja langsung;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan



- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.13 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Kas Daerah

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Kas Daerah;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga
- c. Keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. memverifikasi surat perintah pencairan dana;
- e. mencatat penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum Bendahara Umum Daerah;
- f. mempersiapkan pembukaan rekening kas umum Daerah pada Bank Umum Pemerintah Daerah;
- g. mempersiapkan pembukaan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran Perangkat Daerah pada Bank Umum Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan buku kas Daerah;
- i. melaksanakan penyusunan laporan harian mengenai posisi kas Daerah;
- j. melaksanakan rekonsiliasi buku kas Daerah dengan laporan Bank;
- k. melaksanakan pengelolaan investasi Daerah setara kas;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk dalam rangka penempatan uang Daerah;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk dalam rangka penempatan uang Daerah;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.14 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahkan Subbidang dan setiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- b. perumusan kebijakan dan pembinaan teknis di Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- c. penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan prognosis enam bulan berikutnya serta laporan arus kas anggaran pendapatan;
- d. pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- e. penyusunan Laporan keuangan pemerintahan Daerah;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas akuntansi dan pelaporan; akuntansi dan Pelaporan;
- g. pembinaan, monitoring dan evaluasi tatakelola keuangan BLUD;
- h. pelaksanaan fasilitasi penetapan status BLUD;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.4.2.15 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Akuntansi

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang Akuntansi;
- b. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pada tingkat SKPKD dan PPKD;
- c. melaksanakan verifikasi terhadap pencatatan transaksi keuangan SKPKD secara sistematis dan kronologis;

- d. melaksanakan verifikasi terhadap pencatatan transaksi keuangan PPKD secara sistematis dan kronologis;
- e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan penyusunan laporan realisasi APBD;
- g. melaksanakan evaluasi atas laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Perangkat Daerah, BLUD dan SKPKD;
- h. melaksanakan pencatatan ke dalam laporan keuangan atas penerimaan dan pengeluaran yang sumber dananya bukan berasal dari APBD;
- i. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. melakukan analisa permasalahan akuntansi;
- k. melaksanakan pembinaan di bidang penatausahaan dan akuntansi keuangan Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara Perangkat Daerah;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

1.4.2.16 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang BLUD

- a. menyusun program dan kegiatan Subbidang BLUD;
- b. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait Laporan Keuangan BLUD dan laporan pertanggungjawaban BLUD;
- c. memverifikasi hasil konversi laporan keuangan BLUD dari Standar Akuntansi Keuangan ke Standar Akuntansi Pemerintah;
- d. memfasilitasi proses administrasi penetapan status BLUD;
- e. memverifikasi Surat Pertanggungjawaban BLUD sebelum disahkan oleh BUD;
- f. melaksanakan rekonsiliasi secara berkala terhadap realisasi pendapatan dan belanja BLUD dan yang dikelola Perangkat Daerah;
- g. memverifikasi laporan pendapatan dan belanja dana Non APBD yang dikelola Perangkat Daerah;
- h. membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja BLUD non APBD secara berkala;
- i. melakukan verifikasi laporan BLUD dan dana lainnya yang dikelola Perangkat Daerah;

- j. melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD ke laporan keuangan Daerah;
- k. melakukan konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja Non APBD kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah khususnya Neraca;
- l. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi tata kelola keuangan BLUD;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugas;

1.4.2.17 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahkan Subbidang dan setiap Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

1.4.2.18 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang analisa kebutuhan dan penghapusan barang milik Daerah;
- b. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik Daerah sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja yang telah ditetapkan;
- c. menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah;
- d. menyusun, menghimpun dan menganalisa kebutuhan Perangkat Daerah dalam rencana kebutuhan barang milik Daerah pengadaan dan rencana kebutuhan barang milik Daerah pemeliharaan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
- e. memfasilitasi proses penilaian barang milik Daerah secara akurat yang tercatat dalam inventarisasi dalam rangka pemanfaatan barang milik

Daerah, penghapusan barang milik Daerah dan penyusunan laporan keuangan Daerah;

- f. menyiapkan dokumen administrasi dalam rangka proses penghapusan barang milik Daerah;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penghapusan barang milik Daerah;
- h. menyusun dan menghimpun laporan daftar barang milik Daerah yang dihapuskan dan dipindahtangankan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi pengendali dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

1.4.2.19 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

- a. menyusun program dan kegiatan sub bidang penatausahaan dan pemanfaatan barang milik Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi proses pelaporan dan pencatatan barang milik Daerah;
- c. melaksanakan administrasi penetapan status penggunaan barang milik Daerah;
- d. memfasilitasi pencatatan barang milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- e. menyiapkan bahan kebijakan penatausahaan dan pemanfaata barang milik daerah;
- f. menyusun target penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Kontribusi pemanfaatan barang milik Daerah;
- g. memfasilitasi pencatatan kartu inventarisasi barang dan Kartu Inventarisasi Ruangan;
- h. memfasilitasi mutasi barang Perangkat Daerah ke dalam daftar rekapitulasi mutasi barang;
- i. mengoordinasikan penetapan pengurus barang dan pejabat penatausahaan pengguna barang;
- j. menghimpun dan mengoordinir laporan inventarisasi barang milik Daerah dari pengurus barang Perangkat Daerah;
- k. melaksanakan sensus barang milik Daerah;

- l. melaksanakan koordinasi dalam rangka penatausahaan dan pemanfaatan barang milik Daerah;
- m. menganalisa dan mengevaluasi besaran kontribusi dan jangka waktu terhadap barang milik Daerah yang dimanfaatkan;
- n. melaksanakan koordinasi dalam rangka klarifikasi data barang milik Daerah yang akan dimanfaatkan;
- o. menyusun daftar pemanfaatan barang milik Daerah;
- p. melakukan pengawasan dan monitoring penatausahaan dan pemanfaatan barang milik Daerah;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.20 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengamanan Barang Milik Daerah

- a. menyusun program dan kegiatan subbidang pengamanan Barang Milik Daerah;
- b. melakukan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengamanan barang milik Daerah secara administrasi, fisik, dan hukum;
- c. melaksanakan perlindungan barang milik Daerah berupa pertanggung jawaban keselamatan bangunan gedung milik Pemerintah Daerah;
- d. menyimpan dan mengamankan dokumen kepemilikan barang milik Daerah;
- e. menyusun daftar dan laporan perkembangan barang milik Daerah yang bersengketa dengan pihak lain;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya

1.4.2.21 Tugas Pokok dan Fungsi UPT

Ketentuan mengenai pembentukan UPT, uraian tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Melaksanakan tugas Operasional dan pelayanan, pengelolaan, pengaturan, pemeliharaan kebersihan. Keamanan gedung pemerintah Kota Balikpapan Adapun fungsi penyelenggaraan kegiatan teknis maupun

manajemen bidang pengelolaan dan perawatan gedung yang operasional dilaksanakan secara swakelola/rutin maupun menggunakan pihak ketiga;

Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan pengelolaan dan perawatan Gedung pemerintah Kota Balikpapan

Penyusunan Program operasional pengelolaan dan perawatan utilitas gedung yang operasional dilaksanakan secara swakelola/rutin maupun dengan pihak ketiga.

Pelaksanaan inventarisasi dan koordinasi ke Kepala Seksi pemeliharaan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan untuk pemeliharaan perbaikan fisik gedung terhadap gedung pemerintah Kota Balikpapan.

Pelaksanaan pengawasan penggunaan seluruh fasilitas gedung yang ada dalam pengelolaan UPTD serta sarana dan prasarana lingkungan dalam rangka memastikan kesesuaian dengan fungsi atau peruntukannya.

1.4.2.22 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Adapun jabatan fungsional di lingkungan Badan Keuangan Dan Aset Daerah terdiri dari:

- a. Perencana Ahli Muda (Kasubag Program)
- b. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah (AKPD)
- c. Analis Kebijakan Ahli Muda (Kasubag Keuangan) dan (Kasubag Penatausahaan dan Pemanfaatan BMD)



STRUKTUR ORGANISASI



AGUS BUDI PRASETYO,
S.I.P., M.T.
KEPALA BKAD



Andang Sinarto,
S.E., CIAE
SEKRETARIS
SUBBAGIAN UMUM



PUPUT TRISDIYANTO,
S.E., Ak. CA, CFrA
KABID
ANGGARAN
SUBBIDANG
PENYUSUNAN
ANGGARAN
SUBBIDANG
KEBIJAKAN
ADMINISTRASI
KEUANGAN



SAHAR,
S.E.
KABID
PERBENDAHARAAN
SUBBIDANG
BELANJA
LANGSUNG
SUBBIDANG
BELANJA TIDAK
LANGSUNG



NANY ERAWATY,
S.E.
KABID AKUNTANSI
DAN PELAPORAN
SUBBIDANG
AKUNTANSI
SUBBIDANG
PELAPORAN



LUKMAN HAKIM,
SS., M.Si
KABID PENGELOLAAN
BMD
SUBBIDANG
ANALISA
KEBUTUHAN
SUBBIDANG
PENGAMANAN
BMD

KEPALA
UPTD
SUBBAGIAN TU
UPTD

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL



1.4.4 Sumber Daya Perangkat Daerah BKAD Kota Balikpapan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan di dukung oleh pegawai sebanyak 138 orang, terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 60 Orang dan non pegawai negeri sipil/tenaga bantuan dan PPPK sebanyak 78 orang.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan didukung oleh pegawai ASN yang terdiri atas PNS dan Non PNS sebagaimana tabel berikut:

Table 1.4.1 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan

NO	JABATAN	GOLONGAN												JUMLAH
		I	II				III				IV			
		b	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	
1	Kepala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4
4	Analisis Kebijakan Muda	-	-	-	-	-	-		1	1	-	-	-	2
5	Kepala Sub Bidang	-	-	-	-	-	-		5	5	-		-	10
6	Perencana Ahli Muda								1					1
7	Kepala UPT	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
8	Kepala Sub Tata Usaha UPT	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
9	Pengelola Data dan Informasi	-	-	-	14	2	1	3	-	-	-	-	-	20



NO	JABATAN	GOLONGAN												JUMLAH	
		I	II				III				IV				
		b	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		
10	Penata laksana Barang Trampil	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
11	Pengadministrasi Perkantoran	-	-	1	-	2	-	3	5	-	-	-	-	11	
12	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
13	Operator Layanan Operasional	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
14	Penelaah Teknis Kebijakan	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	
KETERANGAN		PNS							Laki-laki = 30 Orang Perempuan = 30 Orang						

Table 1.4.2 Jumlah Pegawai Non PNS

No	Jabatan	Jumlah	Laki - laki	Perempuan
1	PPPK	1	-	1
2	Pelaksana Ahli	3	3	-
3	Tenaga Bantu	7	-	7
4	Tenaga Bantu UPTD	67	50	17
Jumlah		78	53	25



Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD Kota Balikpapan di dukung sarana dan prasarana kantor sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Table 1.4.3 Sarana dan Prasarana Kantor BKAD

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	874	
	KOMPUTER	428	
	P.C Unit	113	Baik
	Lap Top	55	Baik
	Note Book	31	Baik
	Tablet PC	5	Baik
	Komputer Unit Lainnya	2	Baik
	Hard Disk	4	Baik
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	6	Baik
	Monitor	1	Baik
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	102	Baik
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16	Baik
	External	6	Baik
	External/Portable Hardisk	36	Baik
	Peralatan Personal Komputer lainnya	12	Baik
	Server	10	Baik
	Router	3	Baik
	Wireless Access Point	1	Baik
	Switch	12	Baik
	Acces Point	11	Baik
	Peralatan Jaringan lainnya	2	Baik
	ALAT ANGKUTAN	30	
	Station Wagon	11	Baik
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Baik
	Pick Up	3	Baik
	Sepeda Motor	14	Baik
	kapal terbang lainnya (dst)	1	Baik



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	6	
	Global Positioning System	4	Baik
	Scanner (Universal Tester)	1	Baik
	Alat Ukur Universal lainnya (dst)	1	Baik
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	343	
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	Baik
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Baik
	Mesin Fotocopy Folio	1	Baik
	Mesin Fotocopy Double Folio	2	Baik
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
	Lemari Besi/Metal	18	Baik
	Lemari Kayu	4	Baik
	Filing Cabinet Besi	2	Baik
	Brandkas	10	Baik
	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Baik
	Lemari Kaca	1	Baik
	Lemari Makan	2	Baik
	CCTV - Camera Control Television System	3	Baik
	Alat Penghancur Kertas	14	Baik
	Mesin Absensi	3	Baik
	LCD Projector/Infocus	4	Baik
	Alat Perekam Suara (Voice pan)	2	Baik
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
	Papan Pengumuman	39	Baik
	Alat Kantor Lainnya	8	Baik
	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
	Meja Rapat	5	Baik
	Kursi Putar	8	Baik
	Meja Computer	5	Baik
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
	Lemari Es	6	Baik
	A.C. Window	10	Baik



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
	A.C. Split	15	Baik
	Kompas Listrik (Alat Dapur)	1	Baik
	Televisi	2	Baik
	Microphone Tabel Stand	10	Baik
	Mic Conference	10	Baik
	Unit Power Supply	16	Baik
	Dispenser	16	Baik
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
	Lemari Besi/Metal	18	Baik
	Lemari Kayu	4	Baik
	Filing Cabinet Besi	2	Baik
	Brandkas	10	Baik
	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Baik
	Lemari Kaca	1	Baik
	Lemari Makan	2	Baik
	CCTV - Camera Control Television System	3	Baik
	Alat Penghancur Kertas	14	Baik
	Mesin Absensi	3	Baik
	LCD Projector/Infocus	4	Baik
	Alat Perekam Suara (Voice pan)	2	Baik
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
	Papan Pengumuman	39	Baik
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
	Lemari Besi/Metal	18	Baik
	Lemari Kayu	4	Baik
	Filing Cabinet Besi	2	Baik
	Brandkas	10	Baik
	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Baik
	Lemari Kaca	1	Baik
	Lemari Makan	2	Baik
	CCTV - Camera Control Television System	3	Baik
	Alat Penghancur Kertas	14	Baik



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
	Mesin Absensi	3	Baik
	LCD Projector/Infocus	4	Baik
	Alat Perekam Suara (Voice pan)	2	Baik
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
	Papan Pengumuman	39	Baik
	Papan Tulis	1	Baik
	Alat Kantor Lainnya	8	Baik
	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
	Meja Rapat	5	Baik
	Kursi Putar	8	Baik
	Meja Computer	5	Baik
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
	Lemari Es	6	Baik
	A.C. Window	10	Baik
	A.C. Split	15	Baik
	Kompor Listrik (Alat Dapur)	1	Baik
	Televisi	2	Baik
	Microphone Tabel Stand	10	Baik
	Mic Conference	10	Baik
	Unit Power Supply	16	Baik
	Dispenser	16	Baik
	Gordyin/Kray	5	Baik
	Alat Rumah Tangga Lainnya	11	Baik
	Alat Pemadam/Portabel	10	Baik
	Meja Tamu Biasa	2	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	Baik
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	44	Baik
	Kursi Kerja Pejabat lainnya	20	Baik
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN	55	



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
	PEMANCAR		
	Audio Amplifier	1	Baik
	Microphone/Wireless MIC	2	Baik
	Microphone/Boom Stand	1	Baik
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	21	Baik
	peralatan studio audio lainnya (dst)	5	Baik
	Camera Electronic	5	Baik
	Rak Peralatan	1	Baik
	Camera Conference	10	Baik
	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	Baik
	Kompas Geologi	2	Baik
	Clinometer	1	Baik
	Alat Studio Pemetaan lainnya	2	Baik
	Telephone Mobile	1	Baik
	Handy Talky (HT)	2	Baik
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	
	Alat Kedokteran umum lainnya	2	Baik
	ALAT LABORATORIUM	10	
	Alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya (dst)	1	Baik
	Video Printer	2	Baik
	Distiling Apparatus	4	Baik
	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1	Baik
	Hardware Conf Off-Line Computer	1	Baik
	Wireless Data Tranmission System	1	Baik
2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PENGELOLA BARANG)	8	
	ALAT BESAR	1	
	Dump Truck	1	Baik



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
	ALAT ANGKUTAN	7	
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Baik
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PENGELOLA BARANG)		
	Pick Up	2	Baik
	Sepeda Motor	3	Baik
	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	Baik
3	UPT PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH	147	
	ALAT BESAR	11	
	compacting equipment lainnya (dst)	1	Baik
	pompa Air	12	Baik
	pompa lainnya (dst)	30	Baik
	Komputer	11	Baik
	Komputer jaringan lainnya (dst)	1	Baik
	P.C Unit	4	Baik
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik
	External/Portabel Hardisk	2	Baik
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	38	
	Mesin Las Listrik	2	Baik
	Mesin Bor Tangan	2	Baik
	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	6	Baik
	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	2	Baik
	Tool Kit Set	1	Baik
	Tool Kit Box	2	Baik
	Termometer Standar	21	Baik
	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2	Baik
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	85	
	Lemari Besi/Metal	10	Baik
	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik
	White Board	5	Baik



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
	Papan Pengumuman	11	Baik
	Alat Kantor Lainnya	20	Baik
	Tempat Tidur Besi	4	Baik
	Mesin Pemotong Rumput	3	Baik
	Alat Pembersih lainnya	4	Baik
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
	A.C. Window	2	Baik
	A.C. Split	13	Baik
	Kipas Angin	2	Baik
	Alat Dapur lainnya	2	Baik
	Sound System	1	Baik
	Unit Power Supply	1	Baik
	Tangga Aluminium	3	Baik
	Dispenser	2	Baik
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	10	Baik
	Camera Electronic	2	Baik
	Handy Talky (HT)	8	Baik
	ALAT LABORATORIUM	3	
	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	3	Baik

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu Strategis BKAD Kota Balikpapan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan dimasa yang akan datang dan berdampak positif bagi pembangunan masyarakat sebagai entitas, Isu Strategis akan berdampak buruk apabila hal yang menjadi kelemahan dan kendala tidak terantisipasi dengan baik. Dan akan menghilangkan potensi positif apabila kekuatan dan peluang tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan Permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas maka isu-isu strategis Badan BKAD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:



Table 1.5.1 Isu Strategis BKAD

No	Isu Strategis BKAD Tahun 2026 dan Tahun 2027	Pengaruh	Dampak
1	PERUBAHAN DATABASE DAN DOMAIN APLIKASI SIPD (SIPD.GO.ID menjadi SIPD.RI) di Tahun Anggaran 2024	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah berpotensi terganggu dan mengalami keterlambatan	Penurunan Nilai RB dan MCP KPK
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah berpotensi terganggu	Penurunan Opini WTP
2	PENYESUAIAN KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN BARU (UU NO. 1 TAHUN 2022 HKPD PENERAPAN TA 2024)	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pengelolaan Perbendaharaan, dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Khususnya terkait Penyesuaian Regulasi Pegelolaan Daerah yang berdampak	Penurunan Opini WTP
3	PENGUNAAN SIPD PENUH di Tahun 2023 (TANPA APLIKASI PENDAMPING LAIN)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah berpotensi terlambat.	Penurunan Opini WTP
4	PENERAPAN DAN PENGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah berpotensi	Penurunan Opini WTP
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	Penurunan Opini WTP



No	Isu Strategis BKAD Tahun 2026 dan Tahun 2027	Pengaruh	Dampak
		Keuangan Daerah akan terhambat	
5	PENERAPAN DAN PENYUSUNAN SSH, SBU, HSPK & ASB	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penurunan Nilai MCP KPK dan Opini WTP
6	PENERAPAN PENENTUAN MASA BMD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penurunan Opini WTP

1.6 Sistematika Penulisan

Secara umum, Laporan Akuntabilitas ini memberikan penjelasan dan informasi mengenai capaian kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2023. Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja BKAD Kota Balikpapan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat pembahasan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini rencana strategis dijabarkan beserta rencana kinerja tahunan termasuk perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini analisis terkait capaian kinerja atas perencanaan kinerja dibahas dan dirinci termasuk faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja.



BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas pembahasan bab sebelumnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sasaran Strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi dalam bentuk yang spesifik dan terarah. Berdasarkan visi Walikota Balikpapan yaitu “Tewujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Moderen dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan misi yang telah ditetapkan dan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan termasuk Misi ke-1 Tujuan Ke-1 dan Sasaran ke-2.

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi untuk mencapai visi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 2021 – 2026. Berikut ini tujuan dan sasaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan:

- Tujuan 1: Meningkatkan pengelolaan keuangan Daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang lebih efektif dan efisien

2.1.2 Sasaran

Sasaran BKAD untuk mencapai tujuan adalah :

- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah

Table 2.1.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan BKAD Kota Balikpapan Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Periode 2021- 2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
Misi ke-1	Tujuan ke-1	Sasaran ke-2	Program ke 1	Urusan ke 1	



MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	URUSAN	PERANGKAT DAERAH
MEWUJUDKAN PENYELENGGARA AN TATA PEMERINTAH YANG BAIK	Meningkatkan Profesionalitas dan Transparasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Penguatan Birokrasi Pemerintahan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan

Table 2.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	N/A	79	80	81	82	83	83
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKAD	N/A	27	28.75	30.5	32.25	34	34
3	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	72.5	74.5	76	77.5	79.5	82.5	82.5
5	Nilai SAKIP OPD	51.63	55	60	65	70	75	75



NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
7	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
9	Manajen Aset	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan	Nilai Sakip Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan	65			
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH		
		Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Internak Perangkat Daerah	78	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		Nilai Sakip	60		Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	89			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-skpd dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	89			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	89			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Presentase Gaji dan Tunjangan Pegawai BKAD yang di bayar	60			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Jumlah dokumen administrasi yang tersusun	60			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Dokumen laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Jumlah dokumen Laporan keuangan Akhir Tahun yang tersusun	5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Jumlah dokumen RKBMD	2			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		IKM Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12			Pengolahan Data Retribusi Daerah
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
		IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	80			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2			Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		IKM Layanan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Jumlah Jenis Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, dan Akuntabel	Persentase tahapan penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta realisaasi APBD yang tepat waktu.	100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, dan Akuntabel	Persentase tahapan penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta realisasi APBD yang tepat waktu.	100%	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
		Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	464			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	464			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	464			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan bidang Anggaran	11			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	600			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		Capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah	100%		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	13			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	144			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	23000			Penatausahaan Pembiayaan Daerah
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	384			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	100%		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	13			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan	1			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan	1			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	105			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	28			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
		Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	3			Analisis Investasi Pemerintah Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1			Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	70%			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
		Persentase peningkatan BMD yang terkelola	100%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1			Penyusunan Standar Harga
		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2			Penatausahaan Barang Milik Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36			Inventarisasi Barang Milik Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50			Pengamanan Barang Milik Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3			Penilaian Barang Milik Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	72			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Utama

Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disusun. Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP sebagaimana diubah dengan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu sasaran strategis, indikator kinerja dan target. Sasaran dalam rencana kinerja tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2024. Selanjutnya Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat berupa output maupun outcome. Adapun target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2024.

Penetapan Indikator Program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholder yang menunjukkan peran utama Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan dalam pelayanan masyarakat. Menindak lanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2023 maka dilakukan Perubahan IKU Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan yang ditetapkan dalam surat Keputusan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 900/1314/BKAD tentang Perubahan atas Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Indikator Kinerja Utama adapun IKU perubahan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut:

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Setelah Rencana Kinerja di buat, maka Renja RKA dan DPA, setelah terbit DPA dibuatlah Perjanjian Kinerja yang merupakan kesepakatan antara Walikota dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan atas kinerja

terukur dengan sumber daya yang ada. Perjanjian Kinerja Kepala BKAD Tahun 2024 sebagai berikut:

Perjajian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65
2	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif,efisien, transparan dan akuntabel	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Nilai	13,570
		Pengalokasian Anggaran belanja dalam APBD	Nilai	19,138
		Transparansi pengelolaan keuangan daerah	Nilai	12,200
		Penyerapan Anggaran	Nilai	13,333
		Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	3,880
		Opini Terhadao Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.496.666.257,00	APBD
2	Program Pengelola Keuangan Daerah	27.557.681.729,37	APBD
3	Perogram Pengelolaan Barang Milik Daerah	71.270.818.477,00	APBD
		122.325.166.463,37	

Gambar 2.2.1 Perjanjian Kinerja BKAD 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Melaksanakan Program kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Anggaran Murni sebesar Rp.108.722.479.279 Melalui mekanisme Perubahan APBD 2024 menjadi Rp. 122.325.166.463,37 adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan Sub kegiatan disajikan pada Tabel 2.5 sebagaimana di bawah ini:



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024	
			PAGU	REALISASI
1	2	3	4	5
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	122.713.526.463	109.460.465.390
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	122.713.526.463	109.460.465.390
1,	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	27.845.041.729	23.571.880.131
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.258.666.500	3.153.370.643
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	47.843.000	43.365.788
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	49.762.000	46.212.019
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	709.007.500	614.090.592
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	388.219.000	352.009.460
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	467.250.000	365.972.512
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	263.500.000	225.870.180
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	270.032.000	202.044.963
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	849.463.000	558.162.827
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	120.000.000	62.420.196
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	50.000.000	38.035.500
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	50.000.000	38.889.306
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	993.590.000	606.297.300



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024	
			PAGU	REALISASI
1	2	3	4	5
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.942.649.500	2.512.115.850
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	90.750.000	84.504.929
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50.000.000	48.286.500
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	400.000.000	356.415.547
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	75.000.000	49.851.420
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	125.000.000	99.886.345
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	123.800.000	75.796.000
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	50.000.000	0
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	2.028.099.500	1.797.375.109
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.906.666.000	1.982.505.560
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	181.500.000	125.487.400
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	121.000.000	90.524.133
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	181.500.000	105.078.084
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	295.350.000	177.649.542
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	81.500.000	28.109.398
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	90.750.000	35.843.822
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	40.000.000	0
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	174.750.000	0
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1.568.056.000	1.379.843.098
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	172.260.000	39.970.083



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024	
			PAGU	REALISASI
1	2	3	4	5
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	13.687.686.429	12.135.375.577
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	240.000.000	0
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	210.000.000	0
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.237.686.429	12.135.375.577
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	4.049.373.300	3.788.512.501
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	30.000.000	29.750.000
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	110.200.000	0
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3.909.173.300	3.758.762.501
2,	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	10.139.519.200	5.821.570.425
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	10.139.519.200	5.821.570.425
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	670.000.000	585.274.356
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	324.999.600	127.757.300
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	664.996.800	496.943.380
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	36.395.000	0
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	585.000.000	275.744.161
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	350.000.000	130.566.458
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	4.528.629.900	2.801.559.975
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	854.998.600	273.734.340
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	849.999.300	283.331.799
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	181.500.000	148.183.000
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	265.000.000	205.864.650
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	828.000.000	492.611.006
3,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.496.666.257	19.651.041.432
	5.02.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	285.999.600	245.582.271
	5.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.499.600	26.454.950
	5.02.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	27.500.000	26.305.700
	5.02.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	27.500.000	26.568.100
	5.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.500.000	34.850.950
	5.02.01.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165.000.000	131.402.571
	5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.588.986.400	11.406.170.273
	5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.107.390.000	10.958.763.221
	5.02.01.02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.756.200	352.030.552
	5.02.01.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.499.300	57.821.000



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024	
			PAGU	REALISASI
1	2	3	4	5
	5.02.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.150.000	17.430.000
	5.02.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.190.900	20.125.500
	5.02.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	11.669.000
	5.02.01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000	11.669.000
	5.02.01.02.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	60.499.600	58.463.250
	5.02.01.02.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	24.200.000	23.436.000
	5.02.01.02.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36.299.600	35.027.250
	5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	781.920.100	609.890.562
	5.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	161.920.100	78.960.000
	5.02.01.02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	310.000.000	256.627.478
	5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	310.000.000	274.303.084
	5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.141.088.011	4.777.359.569
	5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.027.500	55.074.000
	5.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.270.764.911	2.221.081.718
	5.02.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.602.100	38.826.500
	5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	704.738.000	551.670.047
	5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93.747.000	91.453.800
	5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	543.225.000	536.940.000
	5.02.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	106.612.000	100.935.000
	5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	936.500.000	877.778.504
	5.02.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	385.871.500	303.600.000
	5.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.345.846	475.700.000
	5.02.01.02.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.200.000	171.000.000
	5.02.01.02.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.102.846	46.800.000
	5.02.01.02.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	282.043.000	257.900.000
	5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.168.872.500	590.724.535
	5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.786.000	97.180.085
	5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.012.086.500	493.544.450
	5.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.923.954.200	1.475.481.972
	5.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	874.289.200	500.362.267
	5.02.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	282.165.000	272.441.550
	5.02.01.02.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	17.500.000	7.492.500
	5.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	450.000.000	396.102.079
	5.02.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	299.083.576



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024	
			PAGU	REALISASI
1	2	3	4	5
		UPTD PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	61.232.299.277	60.415.973.402
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	61.232.299.277	60.415.973.402
4,	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	61.232.299.277	60.415.973.402
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	61.232.299.277	60.415.973.402
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	61.232.299.277	60.415.973.402
5	J U M L A H		122.713.528.491	109.460.465.395



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan adalah perwujudan kewajiban Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah 2021-2026, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan melaksanakan kewajiban berakuntabilitasnya melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Table 3.1.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	22,15	73,83%
2	Pengukuran Kinerja	30	19,81	66,03%
3	Pelaporan Kinerja	15	11,64	77,53%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	17,57	70,28%

Sumber: LHE Tahun 2023 oleh Inspektorat Kota Balikpapan

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel diatas. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat, terdapat beberapa rekomendasi yang menjadi temuan dan perlu ditindaklanjuti. BKAD telah mengambil langkah-langkah untuk merespon hal tersebut dan tindak lanjut yang telah dilakukan diharapkan dapat



menjadi Perbaikan BKAD dalam mewujudkan sistem kerja yang efektif dan akuntabel serta berorientasi capaian kinerja. Rekomendasi dan tindak lanjut yang dimaksud sebagai berikut:

Table 3.1.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut LHE 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar melakukan perbaikan atas Pohon Kinerja sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja yang menginformasikan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>), untuk kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi;	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
2	Menyusun monitoring evaluasi rencana aksi dengan mencantumkan target dan realisasi indikator kinerja sasaran serta memuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dan menindaklanjutinya;	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
3	Gunakan hasil survey pegawai terkait pemahaman dan kepedulian terhadap kinerja untuk perencanaan kinerja berikutnya;	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
4	Agar memperbarui SOP pengumpulan data kinerja, dengan memuat penggunaan aplikasi yang ada sehingga mekanisme pengumpulan kinerja dapat diandalkan;	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
5	Melakukan reviu atas target indikator agar target kinerja lebih menantang	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
6	Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja;	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
7	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan merupakan ukuran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja atas capaian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dilakukan terhadap hasil reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan target indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Target IKU Tahun 2024. Sehingga dilakukan perhitungan ulang terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra BKAD Tahun 2021-2026 dan Renja BKAD Tahun 2024, sehingga dapat lebih menggambarkan



kondisi nyata yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan selaku SKPD yang mengampu tugas sebagai pengelola keuangan dan aset daerah serta tugas dan fungsi yang diatur di dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020.

Table 3.2.1 Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Selanjutnya, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Table 3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian	Predikat
			Target	Realisasi		
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	65	71,16	109,48%	Melebihi Target
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	Kesesuaian Dokumen Perencanaan	Nilai	13,570	13.148	96,89%	Tidak Tercapai



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian	Predikat
			Target	Realisasi		
Daerah dan BMD yang Berkualitas, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	dan Penganggaran					
	Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	Nilai	19,138	20	104,50%	Melebihi Target
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	12,20	15	122,95%	Melebihi Target
	Penyerapan Anggaran	Nilai	13,333	15	112,50%	Melebihi Target
	Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	3,880	3.919	101,01%	Melebihi Target
	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP	WTP	100%	Sesuai Target

Data yang disajikan adalah target dan penilaian SAKIP, IPKD Dan LKPD tahun 2023 yang dievaluasi, dinilai dan diaudit serta menghasilkan nilai pada tahun 2024. Berdasarkan perjanjian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan tahun 2024 yang telah direvisi pada bulan Desember 2024, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang menjadi alat ukur tercapainya sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan tabel 3.2.1 tergambar dengan jelas bahwa sebagian besar indikator-indikator yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 perubahan telah melampaui targetnya. Namun, ada 1 (satu) indikator yang belum bisa tercapai yaitu Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (target 13,570 dengan capaian 13.148). Mengingat masih ada indikator sasaran yang belum tercapai, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu melakukan usaha maksimal agar capaian indikator tersebut bisa terealisasi pada tahun 2025.

Teknis penilaian Indikator yang belum tercapai, yaitu Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dirinci dalam lampiran Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Untuk indikator tersebut merupakan indikator yang nilai akhirnya diukur dengan memperhitungkan kesesuaian dokumen mulai dari dokumen perencanaan RPJMD hingga menjadi dokumen anggaran APBD.

3.2.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2024

Berikut tersaji realisasi kinerja tahun 2021 - 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah disesuaikan. Perhitungan di tabel 3.2 menjadi perbandingan dan serta gambaran progres perkembangan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai sasaran strategisnya.

Table 3.2.3 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	51,63	Melebihi Target	54,05	Melebihi Target	58,66	Melebihi Target	71,16	Melebihi Target
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang Berkualitas, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	4,0057	Tidak Tercapai	10,6893	Melebihi Target	13,6253	Melebihi Target	13,148	Tidak Tercapai
	Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	19,3103	Melebihi Target	19,1379	Melebihi Target	20	Melebihi Target	20	Melebihi Target
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	3,3621	Tidak Tercapai	12,931	Melebihi Target	14,4828	Melebihi Target	15	Melebihi Target
	Penyerapan Anggaran	20	Melebihi Target	13,3333	Sesuai Target	13,3333	Sesuai Target	15	Melebihi Target
	Kondisi Keuangan Daerah	2,5283	Melebihi Target	5,4596	Melebihi Target	4,8091	Melebihi Target	3,919	Melebihi Target
	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	Sesuai Target	WTP	Sesuai Target	WTP	Sesuai Target	WTP	Sesuai Target

Tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjukkan pada tabel 3.2.3 menggambarkan bahwa secara umum capaian indikator mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dari 7 (tujuh) indikator yang telah ditetapkan hanya ada satu indikator yang mengalami fluktuatif kenaikan dan penurunan namun masih diatas target yang telah ditetapkan yaitu indikator



Penyerapan Anggaran dimana terjadi penurunan dari nilai 20 pada tahun 2020 turun 6,6667 poin menjadi 13,333 pada tahun 2021 dan tetap pada tahun 2022 dan naik kembali pada tahun 2023. Selain indikator tersebut terjadi tren naik pada 4 (empat) indikator lainnya yaitu Nilai SAKIP, Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah serta mempertahankan opini WTP atas LKPD untuk ke-11 kalinya pada tahun 2023. Sedangkan untuk indikator Kondisi Keuangan Daerah terjadi penurunan nilai sebesar 0.89 poin pada tahun 2023 menjadi 3,919 dari yang sebelumnya 4,809.

3.2.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Realisasi kinerja Renstra tahun 2021 – 2026 dapat disampaikan sebagai berikut bahwa sesuai dengan perjanjian Kinerja 2024 masih relevan dan dapat dicapai hingga kondisi akhir Renstra dan dapat terlihat pada tabel berikut:

Table 3.2.4 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BKAD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	81	82,068	102,58%	83	98,87%
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKAD	Poin	28,75	-	N/A	34	-
		Nilai SAKIP	Poin	65	71,16	106,65%	75	94,88%
	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan,	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	100%



Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
	dan akuntabel							

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan nilai akumulasi atas 6 (enam) indikator yang telah dijabarkan sebelumnya pada perjanjian kinerja yaitu Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyerapan Anggaran, Kondisi Keuangan Daerah, Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

Sesuai dengan surat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3/6145/BSKDN tentang Penyampaian SK Mendagri tentang Hasil IPKD TA 2023, Tahun Ukur 2024, diperoleh rangkuman realisasi nilai IPKD yang terbagi menjadi enam dimensi untuk tingkat nasional sesuai dengan kategori pemerintah daerah. Mengingat IPKD merupakan capaian kinerja maka Tabel 3.6 dapat menggambarkan perbandingan realisasi kinerja Kota Balikpapan dibandingkan dengan capaian kinerja Nasional (Rata-rata capaian nasional).

Table 3.2.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Rata-rata Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realiasi Kinerja	Realisasi Nasional
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Nilai	13,148	10,066
		Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	Nilai	20	18,780
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	15	11,878



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realiasi Kinerja	Realisasi Nasional
		Penyerapan Anggaran	Nilai	15	13,333
		Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	3,92	4,337
		Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Nilai	15	14,643
NILAI TOTAL				81,251	71,318
STANDAR DEVIASI				6,512	

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan dan kegagalan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan dalam mencapai target indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan didalam dokumen Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Renja 2023 dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal maupun eksternal yang dapat dikontrol maupun tidak dapat dikontrol memiliki pengaruh dengan proporsi tertentu dalam rangka pencapaian indikator kinerja. Analisis atas keberhasilan dan kegagalan tersebut adalah sebagai berikut:

3.2.5.1 Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu instrumen untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang bersih sehingga good governance dapat diwujudkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari pelaksanaan SAKIP itu sendiri. Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024, nilai SAKIP menjadi salah satu indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran strategis dan selaras dengan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Dalam perjanjian kinerja tersebut, nilai yang ditargetkan untuk indikator Nilai SAKIP adalah 65, maka penilaian SAKIP tahun 2023 yang dievaluasi oleh APIP menghasilkan nilai pada tahun 2024 yaitu 71,16 dengan predikat BB atau Sangat Baik. Maka hal ini menunjukkan keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

Berdasarkan realisasi nilai yang diperoleh, Badan Keuangan dan Aset Daerah sejatinya telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 71,16 dari target

nilai sebesar 65. Perlu diketahui bahwa capaian tersebut meningkat jauh dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 58,66. Kenaikan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi bukti bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan terobosan untuk melakukan evaluasi internal dan meningkatkan kinerja organisasi agar mencapai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih harus ditingkatkan lagi demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel.

Berdasarkan hasil evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 oleh APIP di 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah memperoleh nilai 71,16 dengan rincian sebagai berikut:

Table 3.2.6 Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP BKAD 2023 yang dievaluasi Tahun 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	22,15	73,83%
2	Pengukuran Kinerja	30	19,81	66,03%
3	Pelaporan Kinerja	15	11,64	77,53%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	17,57	70,28%
Total		100	71,16	71,16%

Berdasarkan Tabel 3.2.5 tersebut, capaian yang paling optimal adalah perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimulai dari Dokumen Renstra, Renja serta Perjanjian Kinerja. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan berkomitmen penuh dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut mulai dari proses perencanaan hingga nantinya dipublikasikan. Selain itu Outcome dan Output dari dokumen-dokumen tersebut telah diperhitungkan mutu dan kualitasnya sehingga perencanaan yang disusun berkontribusi sebaik mungkin demi tercapainya visi dan misi Wali Kota Balikpapan. Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak hanya melanjutkan namun terus berbenah untuk meningkatkan capaian Perencanaan Kinerja mulai dari proses penyusunan, publikasi dan evaluasi berkala untuk menghasilkan Outcome dan Output yang berkualitas.

3.2.5.2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan



akuntabel dalam periode tertentu. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, IPKD terdiri atas 6 (enam) dimensi yang merupakan suatu besaran yang terdiri dari atas: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD. Akumulasi atas keenam dimensi tersebut menghasilkan nilai IPKD yang menjadi salah satu indikator kinerja yang selaras dengan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026.

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024, sesuai dengan hasil rekomendasi atas reviu indikator kinerja oleh Bagian Organisasi, IPKD muncul sebagai indikator kinerja dan dirinci menjadi 6 (enam) indikator sesuai dimensi IPKD. Adanya penambahan indikator kinerja ini merupakan salah satu bentuk evaluasi dan perbaikan kinerja demi mencapai sasaran strategis yang sesuai dengan kenyataan dan selaras dengan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026.

Sesuai penilaian yang dirilis oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) IPKD Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Nomor 900.1.15.3/6145/BSKDN tanggal 13 Desember 2024 tentang tentang Penyampaian SK Mendagri tentang Hasil IPKD TA 2023, Tahun Ukur 2024, Kota Balikpapan memperoleh indeks total sebesar 82,068 dan memperoleh Nilai A dengan kategori Baik untuk kategori Daerah Kemampuan Keuangan Tinggi.

Table 3.2.7 Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 Kota Seluruh Indonesia
Kategori Kemampuan Keuangan Tinggi

No	Kota	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
1	KOTA MEDAN	12,646	20	15	20	5,945	15	88,591	Baik	A
2	KOTA DEPOK	13,454	19,828	14,741	20	3,297	15	86,319	Baik	A
3	KOTA BALIKPAPAN	13,148	20	15	15	3,92	15	82,068	Baik	A
4	KOTA PEKALONGAN	13,893	15	15	20	1,871	15	80,764	Baik	A
5	KOTA SEMARANG	11,846	20	15	13,333	2,989	15	78,168	Baik	A
6	KOTA BATAM	11,394	20	14,741	13,333	3,611	15	78,08	Baik	A
7	KOTA SURAKARTA	11,226	20	14,741	13,333	3,689	15	77,989	Baik	A
8	KOTA PONTIANAK	11,055	19,655	15	13,333	2,909	15	76,952	Perlu Perbaikan	B
9	KOTA MOJOKERTO	12,116	19,483	13,966	13,333	1,489	15	75,387	Perlu Perbaikan	B
10	KOTA TIDOREKEPULUAN	11,534	19,31	7,5	20	1,513	15	74,857	Perlu Perbaikan	B
11	KOTA SAMARINDA	9,166	19,828	15	13,333	2,319	15	74,645	Perlu Perbaikan	B



No	Kota	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
12	KOTA TANG RANG SELATAN	9,057	20	9,569	15	5,687	15	74,313	Perlu Perbaikan	B
13	KOTA YOGYAKARTA	11,734	14,828	15	15	2,711	15	74,273	Perlu Perbaikan	B
14	KOTA MATARAM	7,222	19,828	15	15	1,975	15	74,025	Perlu Perbaikan	B
15	KOTA BITUNG	8,546	15	14,741	20	0,446	15	73,733	Perlu Perbaikan	B
16	KOTA BANDUNG	10,783	20	14,741	15	7,558	5,01	73,093	Perlu Perbaikan	B
17	KOTA MADIUN	10,733	19,483	12,414	13,333	1,833	15	72,796	Perlu Perbaikan	B
18	KOTA MAKASSAR	9,619	20	15	6,667	6,348	15	72,634	Perlu Perbaikan	B
19	KOTA BONTANG	12,069	19,828	9,052	13,333	3,316	15	72,597	Perlu Perbaikan	B
20	KOTA SURABAYA	10,676	14,828	13,707	10	7,762	15	71,973	Perlu Perbaikan	B
21	KOTA JAMBI	9,479	19,483	12,931	13,333	1,523	15	71,749	Perlu Perbaikan	B
22	KOTA BEKASI	12,541	20	15	15	3,778	5,01	71,33	Perlu Perbaikan	B
23	KOTA BLITAR	10,894	15	15	13,333	1,772	15	71	Perlu Perbaikan	B
24	KOTA TARAKAN	12,244	20	8,017	13,333	2,097	15	70,692	Perlu Perbaikan	B
25	KOTA PALEMBANG	9,994	20	15	13,333	2,28	10,005	70,613	Perlu Perbaikan	B
26	KOTA PALU	9,183	14,828	9,569	20	1,644	15	70,224	Perlu Perbaikan	B
27	KOTA BANJARMASIN	12,174	19,828	14,741	6,667	1,811	15	70,221	Perlu Perbaikan	B
28	KOTA MALANG	10,907	15	12,672	13,333	2,452	15	69,365	Perlu Perbaikan	B
29	KOTA BOGOR	8,561	14,828	13,707	15	2,037	15	69,132	Perlu Perbaikan	B
30	KOTA TEGAL	13,951	15	13,448	10	1,624	15	69,023	Perlu Perbaikan	B
31	KOTA PEKANBARU	9,678	14,483	13,707	13,333	2,42	15	68,621	Perlu Perbaikan	B
32	KOTA MANADO	10,87	19,31	15	6,667	1,614	15	68,46	Perlu Perbaikan	B
33	KOTA TANGERANG	5,938	14,655	13,448	13,333	5,423	15	67,798	Perlu Perbaikan	B
34	KOTA BANJARBARU	6,868	20	8,534	15	2,157	15	67,56	Perlu Perbaikan	B
35	KOTA BUKITTINGGI	7,114	14,138	13,966	15	1,445	15	66,663	Perlu Perbaikan	B
36	KOTA BATU	9,81	14,828	9,828	15	1,701	15	66,166	Perlu Perbaikan	B
37	KOTA MAGELANG	9,985	10	13,448	15	2,679	15	66,113	Perlu Perbaikan	B
38	KOTA DUMAI	8,237	19,655	5,172	13,333	2,274	15	63,672	Sangat Perlu Perbaikan	C



No	Kota	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
39	KOTA PARE PARE	11,719	15	13,707	6,667	1,307	15	63,4	Sangat Perlu Perbaikan	C
40	KOTA CILEGON	10,11	15	14,224	6,667	1,913	15	62,914	Sangat Perlu Perbaikan	C
41	KOTA PASURUAN	11,621	14,138	13,19	6,667	1,594	15	62,21	Sangat Perlu Perbaikan	C
42	KOTA SUBULUSSALAM	11,066	9,655	13,448	10	0,721	15	59,89	Sangat Perlu Perbaikan	C
43	KOTA KEDIRI	10,72	14,655	7,5	10	1,882	15	59,757	Sangat Perlu Perbaikan	C
44	KOTA PAGAR ALAM	9,733	13,793	9,569	13,333	1,739	10,005	58,173	Sangat Perlu Perbaikan	C
RATA – RATA									71,318	
STANDAR DEVIASI									6,512	

Hasil tersebut melampaui perolehan Nilai IPKD tahun sebelumnya dengan capaian indeks total sebesar 82,068, nilai A dengan kategori Baik. Peningkatan ini menjadi bukti nyata bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan serius dan berkomitmen untuk mencapai sasaran strategis dengan melakukan evaluasi dan langkah-langkah perbaikan sehingga indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja khususnya IPKD dapat terlampaui. Selain melakukan evaluasi internal organisasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga menjalin kerjasama yang baik dan saling bersinergi dengan SKPD lain yang terlibat untuk mencapai target nilai IPKD.

Dilihat lebih rinci, untuk mencapai target nilai IPKD sesuai dokumen Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 terdapat 6 (enam) dimensi yang menjadi pembentuk indeks total IPKD, masing-masing dimensi tersebut telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu:

- kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran;
- pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
- transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- penyerapan anggaran;
- kondisi keuangan daerah;
- opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Masing-masing dimensi memiliki bobot untuk membentuk indeks total IPKD. Badan Keuangan dan Aset Daerah memperhatikan setiap dimensi untuk dikontrol dan dievaluasi secara berkala. Setiap dimensi telah dilakukan kontrol internal dengan kertas kerja berbentuk spreadsheet sebagai acuan dan bahan evaluasi organisasi. Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan untuk memantau dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, pada indikator ini Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD menyusun RKPD dengan memperhatikan amanat RPJMD dan menjaga keselarasan program antara dokumen perencanaan tersebut. Selain itu Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD yang berwenang dalam penyusunan KUA-PPAS menyusun dokumen penganggaran tersebut selaras dengan program-program dalam dokumen perencanaan RKPD yang mana telah selaras dengan RPJMD. Selanjutnya dalam proses penyusunan APBD, program dan pagu yang telah ditetapkan dalam KUA-PPAS akan diselaraskan semaksimal mungkin sebagai komitmen bahwa dalam proses penyusunan perencanaan anggaran telah dilakukan dengan matang sehingga perubahan pada saat penyusunan anggaran muncul seminimal mungkin bahkan tidak ada perbedaan. Sesuai dengan Tabel 3.6, pada indikator D.1.1 – D.1.3 kesesuaian antar nomenklatur program pada dokumen penganggaran KUA PPAS dan APBD tetap konsisten dengan dokumen penganggaran RPJMD dan RKPD. Indikator yang perlu dievaluasi dan mendapat perhatian khusus adalah D.1.4 dimana kesesuaian yang diperoleh sebesar 57,3%. Namun, mengingat indikator ini berfokus pada pagu di dokumen perencanaan RKPD dan penganggaran KUA-PPAS maka terdapat banyak faktor yang harus diperhatikan dan tidak dapat diabaikan. Beberapa faktor yang tersebut adalah sebagai berikut:

- a) terjadinya penambahan alokasi pendapatan transfer dari pusat dan bantuan keuangan provinsi pada fase pembahasan KUA PPAS Perubahan 2023
- b) penambahan dan perubahan alokasi belanja prioritas dalam pembahasan KUA PPAS Perubahan 2023 antara eksekutif dan legislatif

Mengingat dasar perubahan pagu antara dokumen perencanaan RKPD dan penganggaran KUA PPAS terjadi pada fase pembahasan terkait perubahan



prioritas dengan pihak lain selain BKAD seperti TAPD dan DPRD maka ketidaksesuaian memiliki dasar yang jelas dan merupakan sesuatu yang terjadi diluar perencanaan. Namun BKAD telah melakukan langkah preventif untuk meminimalisir hal tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Bappeda Litbang Kota Balikpapan, disepakati bahwa mulai fase perencanaan pada dokumen RKPD rencana belanja telah dirinci dan nantinya akan diasistensi sebelum masuk ke ranah penganggaran KUA-PPAS dan telah diterapkan untuk APBD 2024 dan APBD 2025, langkah ini akan dievaluasi efektivitasnya untuk menjadi dasar bagi BKAD memaksimalkan kesesuaian nomenklatur dan pagu pada dokumen perencanaan dan penganggaran.

Table 3.2.8 Hasil Pengukuran Dimensi 1 - Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

No	Dimensi 1 – Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Kesesuaian
D.1.1	Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD	100%
D.1.2	Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dan KUA-PPAS	100%
D.1.3	Kesesuaian Nomenklatur Program KUA-PPAS dan APBD	100%
D.1.4	Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUA-PPAS	40,5%
D.1.5	Kesesuaian Pagu Program KUA-PPAS dan APBD	97,8%
RATA – RATA KESESUAIAN		87,7%
NILAI DIMENSI 1		13,148

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Badan Keuangan dan Aset Daerah berhasil memperoleh nilai maksimal pada dimensi ini, hal ini menggambarkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah berkomitmen penuh dalam menjalankan amanat undang-undang terkait mandatory spending dalam penyusunan anggaran tahun 2023. Badan Keuangan dan Aset Daerah akan terus menjalankan amanat ini dan berpegang teguh pada prinsip dan peraturan perundang-undangan. Hasilnya untuk dimensi ini BKAD mencapai nilai maksimal, hal ini akan terus dipertahankan.

Table 3.2.9 Hasil Pengukuran Dimensi 2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

No	Alokasi Belanja	Rasio Anggaran	Skor
1	Dana Pendidikan	0.2158	1
2	Dana Kesehatan	0.1414	1
3	Belanja Infrastruktur	0.4144	1
4	Belanja untuk Memenuhi SPM	Memenuhi Standar Belanja SPM	1
JUMLAH			4
RATA-RATA			1

NILAI DIMENSI 2

20

Transparansi pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah memegang teguh amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selaras dengan hal tersebut, indikator ini mensyaratkan organisasi untuk transparan dalam melakukan publikasi dokumen keuangan daerah termasuk keteraksesannya bagi publik. Nilai yang diperoleh dari indikator ini adalah 15 dari nilai maksimal sebesar 15. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan prinsip transparansi dan berkomitmen untuk menjaganya di tahun-tahun mendatang. Salah satu tindakan yang akan dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan SKPD-SKPD yang terkait atas dipublikasikannya 29 dokumen yang dipersyaratkan pada dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu koordinasi yang baik juga harus ditingkatkan dengan Diskominfo selaku SKPD yang berwenang dalam mempublikasikan dokumen. Saling membantu dan melaksanakan tugas untuk memaksimalkan penilaian atas indikator tersebut.

Table 3.2.10 Hasil Pengukuran Dimensi 3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Dokumen	Batas Akhir Unggah	Rentang Waktu	S/TS	Ketepatan	Keteraksesan
1	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah	30 Hari	0 Hari	S	1	1
2	Informasi Realisasi Belanja Daerah	30 Hari	0 Hari	S	1	1
3	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah	30 Hari	0 Hari	S	1	1
4	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	30 Hari	0 Hari	S	1	1
5	Informasi Laporan Arus Kas	30 Hari	0 Hari	S	1	1
6	Informasi Opini BPK RI	30 Hari	0 Hari	S	1	1
7	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	30 Hari	0 Hari	S	1	1
8	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah	30 Hari	0 Hari	S	1	1
9	Informasi CaLK Pemerintah Daerah	30 Hari	0 Hari	S	1	1
10	Informasi Neraca	30 Hari	0 Hari	S	1	1
11	Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD	30 Hari	0 Hari	S	1	1



No	Dokumen	Batas Akhir Unggah	Rentang Waktu	S/TS	Ketepatan	Keteraksesan
12	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD	30 Hari	0 Hari	S	1	1
13	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi	30 Hari	1 Hari	S	1	1
14	Informasi Ringkasan Dokumen RKPD	30 Hari	4 Hari	S	1	1
15	Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD	30 Hari	14 Hari	S	1	1
16	Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD	30 Hari	14 Hari	S	1	1
17	Informasi DPA PPKD	30 Hari	2 Hari	S	1	1
18	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran	30 Hari	17 Hari	S	1	1
19	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	30 Hari	14 Hari	S	1	1
20	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD	30 Hari	28 Hari	S	1	1
21	Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah	30 Hari	7 Hari	S	1	1
22	Informasi Rencana Umum Pengadaan	30 Hari	14 Hari	TS	1	1
23	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	30 Hari	28 Hari	S	1	1
24	Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	30 Hari	21 Hari	S	1	1
25	Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	30 Hari	29 Hari	S	1	1
26	Informasi Ringkasan DPA SKPD	30 Hari	2 Hari	S	1	1
27	Informasi Peraturan Daerah tentang APBD	30 Hari	0 Hari	S	1	1
28	Informasi Kebijakan Umum Anggaran	30 Hari	17 Hari	S	1	1

No	Dokumen	Batas Akhir Unggah	Rentang Waktu	S/TS	Ketepatan	Keteraksesan
29	Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD	30 Hari	11 Hari	S	1	1
JUMLAH					29	29
RATA-RATA					1	1
NILAI DIMENSI 3					15	

Penyerapan anggaran, dimensi ini mengukur persentase antara anggaran belanja dan realisasinya, dalam ketentuan IPKD secara rinci menyebutkan minimal persentase yang dicapai adalah $\geq 80\%$ agar dikategorikan sebagai “keberhasilan” dan diberi skor. Penyerapan anggaran yang dihitung adalah belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sesuai Tabel 3.11, Pemerintah Kota Balikpapan memperoleh nilai 15 dari nilai maksimal 20. Secara target nilai, indikator yang diperoleh telah memenuhi target indikator kinerja utama. Namun kurang maksimalnya hasil ini disebabkan oleh satu jenis belanja, yaitu belanja tidak terduga. Berdasarkan LRA Kota Balikpapan Tahun 2023 (audited) realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp22.464.664.572 dari total anggaran sebesar Rp38.680.510.420 (58,077%). Perlu diketahui bahwa belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Jika ditinjau lebih lanjut, anggaran untuk belanja tidak terduga tahun 2023 telah disesuaikan dan dikurangi dibandingkan anggaran tahun 2022. Anggaran belanja tidak terduga tahun 2023 hanya sebesar 77,18% dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 (LRA 2022 Audited). Mengingat capaian tahun sebelumnya juga tidak mencapai 80% (capaian tahun 2022 sebesar 66,90%). Hal ini akan menjadi catatan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menentukan perencanaan belanja ini kedepannya tanpa mengurangi esensi dari belanja tidak terduga itu sendiri. Belanja tidak terduga hanya dapat digunakan untuk dua kriteria khusus, yaitu darurat (bencana) dan mendesak. Realisasi penyerapannya tidak berorientasi pada capaian tertentu seperti belanja lainnya.

Table 3.2.11 Hasil Pengukuran Dimensi 4 - Penyerapan Anggaran

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian	Skor
1	Belanja Operasional	Rp2.652.873.430.301	Rp2.331.395.721.553,33	85.228%	1
2	Belanja Modal	Rp1.587.121.537.596	Rp1.391.243.269.229,31	87,658%	1
3	Belanja Tidak Terduga	Rp38.680.510.420	Rp22.464.664.572	66.903%	0



No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian	Skor
4	Belanja Transfer	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000	100%	1
TOTAL SKOR					3
RATA-RATA					0,75
NILAI DIMENSI 4					15

Kondisi keuangan daerah, dimensi ini secara khusus digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif. Dalam proses pengukuran, rasio-rasio keuangan akan digunakan sebagai cerminan kondisi keuangan daerah, rasio-rasio keuangan yang dimaksud, yaitu kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan. Capaian dimensi kondisi keuangan daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel Tabel 3.2.1. Capaian pada indikator ini telah tercapai, meskipun apabila ditinjau secara capaian maka target maupun realisasi dimensi ini tergolong rendah (target 3,880 dan realisasi 3,919 dari nilai maksimal 15). Namun, hal ini bukan tanpa alasan. Sesuai dengan kertas kerja mandiri yang dikelola BKAD dalam melakukan self-assesment terhadap target dan capaian Nilai IPKD, khusus dimensi ini terdapat faktor luar yang tidak dapat dikendalikan, yaitu komponen skor daerah lain dengan kategori keuangan yang sama. Sebagaimana diatur dalam teknis perhitungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang IPKD, dimensi ini diukur dengan menghitung indeks rasio suatu daerah kemudian membandingkannya dengan daerah lain dengan kategori keuangan yang sama. Dengan kata lain rasio keuangan daerah lain dapat mempengaruhi perolehan nilai daerah lain. Target yang dicantumkan BKAD dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 merupakan target yang berdasar setelah memperhitungkan banyak faktor seperti, kinerja LKPD Kota Balikpapan lima tahun terakhir, pertumbuhan rasio-rasio yang diperlukan serta membandingkannya dengan daerah lain sebagai sampling. Namun, target belum tercapai maka perbaikan akan terus dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala dan riset yang lebih akan dilakukan selain pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.



Table 3.2.12 Hasil Pengukuran Dimensi 5 - Kondisi Keunagan Daerah

No	Kondisi Keuangan Daerah	Skor
1	Kemandirian Keuangan	0,2914
2	Fleksibilitas Keuangan	0,3422
3	Solvabilitas Operasional	0,3754
4	Solvabilitas Jangka Pendek	
5	Solvabilitas Jangka Panjang	0,4283
6	Solvabilitas Layanan	0,1307
TOTAL SKOR		1,568
RATA-RATA		0,2613
NILAI DIMENSI 5		3,9199

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun 2024 belum mendapat penilaian oleh BPK hingga laporan ini dibuat maka data yang akan ditampilkan sesuai penilaian IPKD Tahun 2023 adalah LKPD Tahun 2023. Dimensi ini secara spesifik mensyaratkan opini yang diperoleh atas LKPD dan dikategorikan sesuai syarat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. Nilai yang diperoleh dari dimensi ini adalah nilai maksimal yaitu 15 mengingat Kota Balikpapan telah mendapat opini WTP pada LKPD Tahun 2023 serta 11 kali berturut-turut sedangkan dalam aturan Dimensi Opini BPK, hanya mensyaratkan 3 kali berturut-turut memperoleh opini WTP pada LKPDnya.

LKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 telah audited dan mendapat opini WTP oleh BPK. Hal ini berarti secara keseluruhan penyajian laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan akuntabel. Namun, terdapat beberapa kelemahan internal control yang terdapat pada LKPD Kota Balikpapan Tahun 2023, yaitu:

1. Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Belum Memadai, hal ini mengakibatkan kurang saji Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar senilai Rp79.210.500,00, potensi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar tidak tertagih, dan piutang per 31 Desember 2022 belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya senilai Rp392.384.750,00;
2. Kekurangan Volume atas 12 Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PU, sehingga mengakibatkan penyajian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada LRA tidak mencerminkan realisasi yang

sebenarnya dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp1.066.308.886,47;

3. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Disnaker Tidak Sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya tertib administrasi keuangan pada Bendahara Pengeluaran dan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 tidak mencerminkan saldo Kas riil sebesar Rp87.704.000,00; dan
4. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Belum Diatur dan Dilaksanakan secara memadai, sehingga mengakibatkan sisa dana BOS reguler senilai Rp519.529.594,08 tidak dapat segera digunakan untuk membiayai operasional sekolah dan tidak terdapat rencana penggunaan anggaran yang jelas atas SiLPA dana BOS.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan antara lain:

1. Menginstruksikan Kepala Dinas Perdagangan untuk menertibkan penatausahaan SKRD serta pencatatan dan pelaporan penerimaan retribusi pelayanan pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menginstruksikan Kepala Dinas PU untuk:
 - a) memproses penyelesaian atas kelebihan pembayaran pada 10 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp874.671.811,96 dengan menyetorkan ke kas daerah; dan
 - b) memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada PPK dan PPTK terkait pelaksanaan, pengawasan, dan pengujian hasil pekerjaan.
3. Menginstruksikan:
 - a) Kepala Dinas Ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD; dan
 - b) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan verifikasi yang memadai terkait pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan Bendahara Pengeluaran.
4. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
 - a) berkoordinasi dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun mekanisme penganggaran dan pemanfaatan sisa dana

BOS Reguler sebesar Rp519.529.594,08 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- b) bersama Kepala Satuan Pendidikan Dasar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dana BOS sesuai dengan tanggung jawabnya.

Temuan atas adanya kelemahan pada penyajian laporan keuangan menjadi hal yang serius khususnya bagi BKAD. Tindak lanjut segera dilakukan dan temuan atas adanya kelemahan menjadi bahan evaluasi bagi BKAD dalam penyajian LKPD yang akuntabel. BKAD berkomitmen penuh dan memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi BKAD sebagai pengelola keuangan dan barang milik daerah termasuk menyajikan LKPD yang akuntabel dan tepat waktu. Performa ini terus berlanjut dan dibuktikan dengan opini WTP yang diperoleh selama ini. Penyajian sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan manajemen barang milik daerah yang andal menjadi standar ditetapkan BKAD dalam penyusunan LKPD. Selain akuntabel, dalam penyusunan LKPD, BKAD menerapkan time line kerja yang terstruktur, sehingga LKPD dapat tersusun tepat waktu dan diserahkan sesuai ketentuan. Dalam penyusunan LKPD Kota Balikpapan Tahun 2023, LKPD telah diserahkan kepada BPK per tanggal 4 Maret 2024 dan menjadi bukti keseriusan BKAD dalam menjaga komitmen atas tugas dan fungsinya yang telah dijelaskan sebelumnya.

3.2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja organisasi yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia pada BKAD menjadi faktor penting dalam mencapai target yang telah ditentukan. Kualitas SDM berdampak langsung dalam kualitas output yang dihasilkan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai bidang dan urusan masing-masing. Berikut persebaran data yang menggambarkan kekuatan SDM BKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pengukuran efisiensi sumber daya khususnya penggunaan anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementrian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$E = \frac{\sum^n_1((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

- Keterangan :
- E

:

Efisiensi
- PAKi

:

Pagu anggaran keluaran i
- RAKi

:

Realisasi anggaran keluaran i
- CKi

:

Capaian keluaran i

Table 3.2.13 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	55	58,66	106,65%	28.622.474.181	17.672.787.723	61,74%	39,97%
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang Berkualitas, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79	81,25	102,85%	129.625.803.670	102.970.396.164	79,44%	25,52%

Berdasarkan Tabel 3.2.14 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada hal ini anggaran, dapat diketahui dengan memasukkan angka-angka kedalam formula yang telah tertera, sehingga menghasilkan hasil akhir efisiensi rata-rata sebesar 32,75%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah Kota Tahun 2023 telah digunakan secara efektif dan efisien. Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki langkah-langkah adaptif untuk menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dalam mencapai target kinerja dan melaksanakan program kegiatan



3.2.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja tentu tidak dapat dicapai dengan sendirinya. Adanya program/kegiatan dalam perencanaan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Berikut analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badann Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 dan 2024 seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Table 3.2.14 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BKAD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKAD	119%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek kepuasan masyarakat (IKM) Internal perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Dae	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan perangkat daerah	100%	Menunjang
2	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	blm ada penilaian	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase jumlah OPD yang tertib dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	Menunjang
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prensentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100%	Menunjang
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang terrealisasi sesuai dengan dokumen perencanaan/Jumlah BMD dalam dokumen perencanaan	100%	Menunjang



3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Table 3.3.1 Realisasi Anggaran BKAD 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100	5
PENDAPATAN DAERAH	2.789.126.838.833	2.746.307.755.669,93	98,46	2.094.819.547.694,36
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42.329.476.935	80.090.701.472,93	189,21	36.945.182.614,19
Retribusi Daerah	5.275.979.400	3.218.438.940,48	61,00	2.830.156.877,00
Retribusi Jasa Usaha	5.275.979.400	3.218.438.940,48	61,00	2.830.156.877,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.042.000.000	42.960.450.399,88	204,17	11.317.875.621,62
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	21.042.000.000	42.960.450.399,88	204,17	11.317.875.621,62
Lain-lain PAD yang Sah	16.011.497.535	33.911.812.132,57	211,80	22.797.150.115,57
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000	655.869.371,00	163,97	760.577.638,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	595.000.000	1.215.000.000,00	204,20	864.166.667,00
Jasa Giro	3.107.366.598	9.171.840.277,30	295,16	8.630.161.951,81
Pendapatan Bunga	5.000.000.000	17.026.172.055,02	340,52	2.306.301.369,84
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0	0,00	0,00	4.830.308.558,26
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	79.155.377,38	0,00	1.957.120.099,78
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.290.000.000	2.441.268.863,27	46,15	2.542.388.387,94
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	0,00	0,00	8.751.125,44
Pendapatan dari Pengembalian	1.619.130.937	2.190.966.534,34	135,32	897.374.317,50
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	1.131.539.654,26	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	42.329.476.935	80.090.701.472,93	189,21	36.945.182.614,19
PENDAPATAN TRANSFER	2.740.214.230.298	2.661.560.594.348,00	97,13	1.987.807.473.947,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.110.061.142.048	2.055.847.928.520,00	97,43	1.549.381.291.871,00
Dana Perimbangan	2.065.435.095.048	2.014.246.024.520,00	97,52	1.504.953.614.871,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	2.065.435.095.048	2.014.246.024.520,00	97,52	1.504.953.614.871,00
Dana Insentif Daerah (DID)	44.626.047.000	41.601.904.000,00	93,22	44.427.677.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	44.626.047.000	41.601.904.000,00	93,22	44.427.677.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	630.153.088.250	605.712.665.828,00	96,12	438.426.182.076,00
Pendapatan Bagi Hasil	533.903.088.250	509.462.665.828,00	95,42	381.760.182.087,00
Bantuan Keuangan	96.250.000.000	96.250.000.000,00	100,00	56.665.999.989,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	630.153.088.250	605.712.665.828,00	96,12	438.426.182.076,00
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	2.740.214.230.298	2.661.560.594.348,00	97,13	1.987.807.473.947,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.583.131.600	4.656.459.849,00	70,73	70.066.891.133,17
Pendapatan Hibah	3.540.000.000	951.000.000,00	26,86	4.683.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.540.000.000	951.000.000,00	26,86	4.683.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.043.131.600	3.705.459.849,00	121,76	65.383.891.133,17



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100	5
Lain-lain Pendapatan	3.043.131.600	3.705.459.849,00	121,76	65.383.891.133,17
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.583.131.600	4.656.459.849,00	70,73	70.066.891.133,17
JUMLAH PENDAPATAN	2.789.126.838.833	2.746.307.755.669,93	98,46	2.094.819.547.694,36
BELANJA DAERAH	158.248.277.851	120.635.943.887,00	76,23	84.110.316.326,57
BELANJA OPERASI	94.705.840.943	76.855.542.341,00	81,15	46.396.134.530,00
Belanja Pegawai	19.222.795.603	9.476.021.308,00	49,30	8.047.923.095,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.647.542.160	3.662.678.869,00	28,96	3.257.437.825,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.575.253.443	5.813.342.439,00	88,41	4.790.485.270,00
Belanja Barang dan Jasa	75.483.045.340	67.379.521.033,00	89,26	38.348.211.435,00
Belanja Barang	8.333.481.680	7.127.644.447,00	85,53	6.025.587.513,00
Belanja Jasa	28.466.224.672	24.786.123.828,00	87,07	18.621.899.632,00
Belanja Pemeliharaan	30.525.969.888	29.990.067.318,00	98,24	10.051.416.616,00
Belanja Perjalanan Dinas	8.157.369.100	5.475.685.440,00	67,13	3.649.307.674,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	94.705.840.943	76.855.542.341,00	81,15	46.396.134.530,00
BELANJA MODAL	23.361.926.488	19.815.736.974,00	84,82	4.188.175.687,20
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.818.385.710	9.458.287.740,00	96,33	3.942.524.410,20
Belanja Modal Alat Besar	190.237.800	189.400.000,00	99,56	189.300.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	477.768.400	408.200.000,00	85,44	459.900.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	10.698.900	10.685.000,00	99,87	38.558.400,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.614.150.410	5.439.734.990,00	96,89	2.512.171.410,20
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.848.992.700	1.792.409.900,00	96,94	106.705.000,00
Belanja Modal Komputer	1.496.537.500	1.438.127.850,00	96,10	526.114.600,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	180.000.000	179.730.000,00	99,85	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	0,00	0,00	109.775.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.071.287.778	10.070.910.334,00	77,05	49.875.277,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	3.242.012.878	3.234.307.207,00	99,76	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	9.829.274.900	6.836.603.127,00	69,55	49.875.277,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	193.403.000	192.988.900,00	99,79	0,00
Belanja Modal Bangunan Air	193.403.000	192.988.900,00	99,79	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	278.850.000	93.550.000,00	33,55	195.776.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	38.850.000	38.500.000,00	99,10	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	240.000.000	55.050.000,00	22,94	195.776.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	23.361.926.488	19.815.736.974,00	84,82	4.188.175.687,20
BELANJA TIDAK TERDUGA	38.680.510.420	22.464.664.572,00	58,08	33.526.006.109,37
Belanja Tidak Terduga	38.680.510.420	22.464.664.572,00	58,08	33.526.006.109,37
Belanja Tidak Terduga	38.680.510.420	22.464.664.572,00	58,08	33.526.006.109,37
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	38.680.510.420	22.464.664.572,00	58,08	33.526.006.109,37
BELANJA TRANSFER	1.500.000.000	1.500.000.000,00	100,00	0,00



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100	5
Belanja Bantuan Keuangan	1.500.000.000	1.500.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	1.500.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	1.500.000.000	1.500.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH BELANJA	158.248.277.851	120.635.943.887,00	76,23	84.110.316.326,57
SURPLUS/DEFISIT	2.630.878.560.982	2.625.671.811.782,93	99,80	2.010.709.231.367,79
PEMBIAYAAN DAERAH	547.870.215.546	650.800.998.070,97	118,79	532.959.779.046,81
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	558.518.501.546	657.612.998.070,97	117,74	555.879.234.046,81
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	558.518.501.546	657.612.998.070,97	117,74	555.879.234.046,81
Pelampauan Penerimaan PAD	78.183.322.429	78.183.322.432,81	100,00	59.046.239.425,34
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	2.644.365.425	107.366.534.323,00	4.060,20	220.088.574.062,00
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	183.000.000	183.000.000,00	100,00	587.539.052,90
Penghematan Belanja	477.507.813.692	484.430.257.260,50	101,45	411.328.821.138,55
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0	(117.894.983.813,59)	0,00	(239.915.685.781,82)
Sisa Belanja Lainnya	0	105.344.867.868,25	0,00	104.743.746.149,84
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	558.518.501.546	657.612.998.070,97	117,74	555.879.234.046,81
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.648.286.000	6.812.000.000,00	63,97	22.919.455.000,00
Penyertaan Modal Daerah	10.648.286.000	6.812.000.000,00	63,97	22.919.455.000,00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.648.286.000	6.812.000.000,00	63,97	22.919.455.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.648.286.000	6.812.000.000,00	63,97	22.919.455.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	547.870.215.546	650.800.998.070,97	118,79	532.959.779.046,81
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	3.178.748.776.528	3.276.472.809.853,90	103,07	2.543.669.010.414,60

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). Penyusunan LKjIP ini juga merupakan bentuk nyata Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam memenuhi amanat undang-undang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Proses penyusunan LKjIP ini terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan, yaitu Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selain dokumen-dokumen tersebut, data-data yang digunakan untuk menggambarkan capaian kinerja merupakan data yang akurat. Setelah pengumpulan data, dilakukan evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024. Mengingat hasil penilaian atas capaian kinerja tahun 2024 belum ada hingga laporan ini disusun maka dilakukan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Sesuai dengan analisis capaian kinerja yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah berhasil melampaui sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan Renstra. Sedangkan untuk indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan 6 (enam) diantaranya berhasil dicapai dan berada diatas target yang telah ditetapkan. Satu indikator yaitu Kondisi Keuangan Daerah yang merupakan dimensi ke-5 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah akan dikaji selanjutnya, dilakukan evaluasi dan langkah-langkah untuk mencapai seluruh indikator yang telah ditetapkan. Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan merupakan capaian yang diperoleh atas kinerja dari semua pihak yang terlibat dalam indikator kinerja. Hal tersebut juga merupakan gambaran

bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan menjalankan sistem kerja yang sistematis, terstruktur dan bersinergis satu sama lainnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Namun, kesepakatan dan komitmen akan perjanjian kinerja serta kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah mampu menjawab tantangan untuk mencapai sasaran dan target bersama. Hasil yang telah dicapai pada tahun 2023 dan 2024 tentu masih perlu ditingkatkan lagi pada periode selanjutnya sebagai bukti komitmen yang kuat dan tanggungjawab untuk menghadapi tantangan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis capaian kinerja, hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu:

1. Komitmen bersama serta keseriusan yang lebih untuk mengaplikasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen objektif dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah secara transparan dan akuntabel khususnya capaian kinerja yang belum maksimal.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disusun menjadi bahan evaluasi internal Badan Keuangan dan Aset Daerah, hasil analisis yang telah dijabarkan menjadi evaluasi sehingga terhindar dari kesalahan dan kegagalan pencapaian kinerja pada periode selanjutnya.



PEMERINTAH
KOTA BALIKPAPAN
BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

2024 LAPORAN AKUNTABILITAS